



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGUGAT** tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2012, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

**TERGUGAT** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1099/Pdt.G/2012/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kota Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2010, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberi kabar apapun kepada Penggugat padahal Penggugat telah pernah mencarinya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 907/Reg.K/2012/PA.Tmk, tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI stasiun Tasikmalaya berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 08 Oktober 2012 dan 08 Nopember 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX Kota Tasikmalaya, dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX Kota Tasikmalaya, dan diberi tanda alat bukti (P1);

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXXX tertanggal XXXX dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarindik, Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P2);

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI I** tempat kediaman di Kota Tasikmalaya;

- Bahwa saksi sangat mengenal dengan Penggugat karena kakak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang menyebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan Penggugat sangat keberatan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat telah pernah mencarinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** tempat kediaman di Kota Tasikmalaya;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi sehingga Tergugat tidak mampu lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerimanya;
- Bahwa sejak 2 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan  
dimana Tergugat bertempat tinggal;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak  
berhasil;  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasanya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan talaknya dengan alasan-alasan sejak awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima keadaan tersebut, juga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah ekonomi yang yang menyebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan Penggugat sangat keberatan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa para saksi telah beberapa kali menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang justru dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang solihah, yang pada gilirannya mengakibatkan dosa yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berperndapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat  
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1  
Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.  
3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan  
ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama. Majelis memandang perlu untuk memerintahkan  
kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk  
mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada PPN yang  
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat  
untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk  
perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal  
89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka  
seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-  
undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan  
perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan  
patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada  
Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. **316.000,-** (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Kota tasikmalaya, pada hari Kamis  
tanggal 17 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul  
Awal 1434 H, oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H, sebagai Hakim  
Ketua Majelis serta Drs. NURDIN dan H.M. JAZULI, S.Ag, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga  
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Drs.  
M. JAM sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. YADI KUSMAYADI, MH.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURDIN.

H.M. JAZULI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. M. JAM.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	<b>316.000,-</b>
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);		

## Catatan:

- Putusan ini telah **diumumkan** pada tanggal, .....
- Putusan ini mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap** tanggal, .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)